



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13220- 13231

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengaruh Pendidikan Perempuan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan Rata-Rata Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Kemiskinan di Indonesia

Salsabila¹, Noni Rozaini²

¹²Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

¹salsa.bilaaa0702@gmail.com , ^{2*}nonirozaini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mencakup 34 provinsi selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar -1,2337 dan probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan perempuan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien 0,0647 dan probabilitas 0,0293, yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan yang layak. Sementara itu, UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien -5,7238 dan probabilitas 0,0000. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,989354, yang berarti 98,93% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan memerlukan kebijakan yang terintegrasi melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan perempuan, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta kebijakan upah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan Perempuan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rata-Rata Upah Minimum Regional (UMR), Indonesia.

1. Latar Belakang

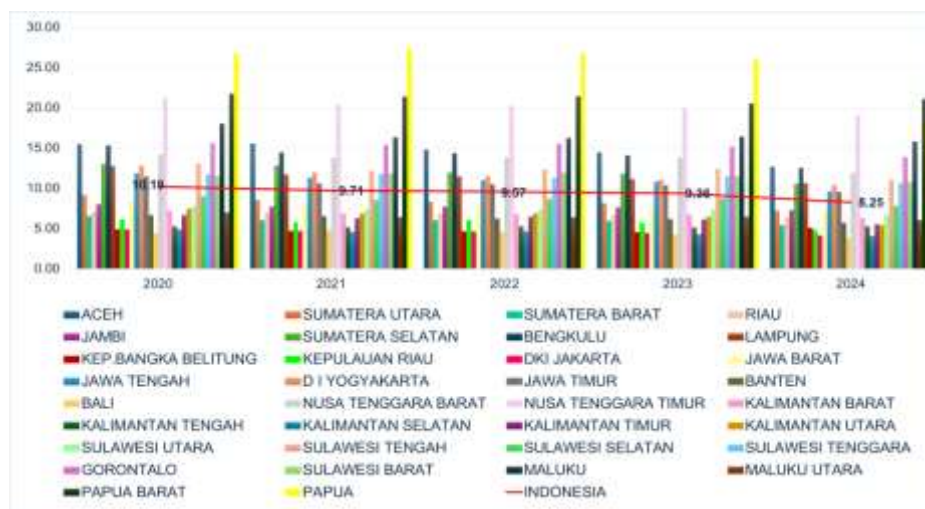
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang bersifat fundamental yang dihadapi hampir diberbagai negara dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kemiskinan bukan sekadar mencerminkan rendahnya tingkat pendapatan serta terbatasnya kesempatan mengenyam pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan layak, serta kualitas hidup yang memadai. Dengan demikian, masalah kemiskinan tidak sekadar dipicu oleh aspek ekonomi, melainkan juga sebagai masalah yang bersifat multidimensional dan berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Alkire et al. (2023) menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada aspek pendapatan belum mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara menyeluruh. Melalui pengembangan Moderate Multidimensional Poverty Index (MMPI), penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan berbagai keterbatasan yang dialami masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa keterbatasan akses dan kesempatan sosial masih dialami oleh sebagian kelompok masyarakat, bahkan di wilayah yang secara ekonomi tampak lebih baik jika dilihat dari ukuran pendapatan semata.

Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, terutama mengingat kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam antarwilayah. Merujuk pada ketetapan Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), kategori masyarakat miskin diberikan kepada warga yang besaran belanja bulanan per individunya tidak mencapai batas standar kemiskinan. Tercatat total populasi yang masuk dalam kategori ini di Indonesia telah menyentuh angka 24,06 juta jiwa per September

2024 dan menunjukkan tren penurunan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih berada di atas wilayah perkotaan.

Salah satu kelompok yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial adalah perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai sekitar 139,42 juta jiwa, atau sekitar 49,51% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 281,60 juta jiwa. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan nasional. Besarnya jumlah penduduk perempuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perempuan dapat memberikan peran yang nyata dalam dinamika ekonomi dan interaksi sosial. Apabila kualitas perempuan meningkat, maka hal tersebut dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, serta kesejahteraan sosial sehingga berpotensi membantu dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan penduduk perempuan masih berada di atas penduduk laki-laki. Persentase penduduk miskin perempuan tercatat sebesar 9,20 persen, sementara persentase penduduk miskin laki-laki sebesar 8,86 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas perempuan dalam rangka mendukung pengurangan kemiskinan di Indonesia.



Sumber : BPS (data diolah)

Gambar 1. Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1. terlihat dinamika tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020–2024. Secara umum, grafik tersebut menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam antarwilayah. Tingkat kemiskinan Indonesia di tahun 2020 sebesar 10,19%, kemudian menurun menjadi 9,71% pada tahun 2021, turun kembali menjadi 9,57% pada tahun 2022, dan sebesar 9,36% pada tahun 2023, hingga mencapai 8,25% pada tahun 2024. Meskipun demikian, perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi masih terlihat cukup besar. Selama periode 2020–2023, Provinsi Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, meskipun persentasenya memperlihatkan tren menurun, yaitu dari 26,80% pada tahun 2020 menjadi 26,03% pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, posisi tersebut beralih ke Papua Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,09%, sementara tingkat kemiskinan di Papua tercatat sebesar 18,09%.

Di sisi lain, Provinsi Bali secara konsisten menunjukkan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Bali sebesar 4,45% dan terus menurun hingga mencapai 3,80% pada tahun 2024. Perbedaan yang signifikan antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Selanjutnya, pendidikan perempuan memiliki peran strategis guna mengurai masalah kemiskinan. Pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM perempuan lewat pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas yang diperlukan dalam dunia kerja. Pendidikan meningkatkan modal manusia (human capital) yang memungkinkan perempuan mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif dan berpendapatan besar. Perempuan dengan capaian pendidikan yang lebih tinggi umumnya mempunyai peluang

yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih terjamin, serta peluang mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

Namun, akses pendidikan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal yang secara struktural menyediakan peluang lebih rendah bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Studi Ramadhani, Sari & Faizah (2025) menunjukkan bahwa hambatan tersebut berkaitan dengan kuatnya norma patriarki, keterbatasan kapasitas ekonomi rumah tangga, serta kurang memadainya fasilitas pendidikan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut mengakibatkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan, sehingga sebagian besar akhirnya bekerja di sektor informal atau bekerja dengan gaji yang rendah. Situasi tersebut pada akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kondisi ekonominya.

Selain pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena mencerminkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketergantungan ekonomi, serta memperkuat daya beli keluarga. Dalam konteks dinamika pasar kerja, Kusumawardhani et al. (2023) menunjukkan bahwa karakteristik individu, seperti usia dan pendidikan, serta faktor struktural dalam pasar tenaga kerja berkorelasi dengan tingkat partisipasi dan karakteristik pekerjaan perempuan.

Namun, keputusan perempuan untuk bekerja tidak hanya didorong oleh alasan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan di sekitarnya. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian Putri et al. (2023) yang mengungkap bahwa minimnya keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja pada sejumlah provinsi di Indonesia utamanya dipicu oleh konstruksi patriarkal, tekanan norma sosial, capaian pendidikan, serta kebijakan ketenagakerjaan yang belum inklusif.

Dalam pembahasan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, upah minimum regional (UMR) memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan pekerja, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Penetapan UMR setiap tahun tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Ketika UMR disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup, daya beli rumah tangga dapat meningkat sehingga risiko kemiskinan berpotensi menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, upah minimum, dan kemiskinan belum tentu menunjukkan keterkaitan yang signifikan secara empiris. Perbedaan karakteristik sosial-ekonomi antarprovinsi, seperti struktur pasar kerja, tingkat industrialisasi, dan ketimpangan pembangunan, dapat memengaruhi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa pendidikan dan partisipasi kerja perempuan berperan dalam menurunkan kemiskinan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang berbeda bergantung pada kondisi wilayah. Temuan mengenai upah minimum juga belum konsisten. Di samping itu, sebagian besar penelitian masih dilakukan secara parsial atau terbatas pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan rata-rata UMR terhadap kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menganalisis hubungan antarvariabel penelitian berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk angka dan diolah menggunakan teknik statistik serta ekonometrika. Adapun metode deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran berkenaan dengan kondisi dan hubungan antarvariabel yang diteliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selama periode 2020–2024. Data mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan variabel penelitian berupa pendidikan perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, rata-rata Upah Minimum Regional (UMR), dan tingkat kemiskinan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel karena metode ini mampu menggabungkan dimensi cross section (antarprovinsi) dan time series (antarwaktu), sehingga memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai hubungan antarvariabel penelitian.

Mengacu pada tujuan penelitian dan variabel yang digunakan, model persamaan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10663>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{RLSit} - \beta_2 \text{PAKit} - \beta_3 \log(\text{UMRit}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Kemiskinan_{it} : Tingkat kemiskinan provinsi i tahun t (%)
 RLSit : Rata-rata lama sekolah perempuan provinsi i tahun t
 PAKit : Partisipasi AK perempuan provinsi i tahun t (%)
 UMRit : Upah minimum regional provinsi i tahun t (Rp)
 i : 1,2,...,34 (provinsi Indonesia)
 t : 2020,2021,...,2024 (5 tahun)

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Chow

Dilakukannya Uji Chow bertujuan untuk memutuskan apakah lebih baik memakai Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	327.794091	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	749.829936	33	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Pada hasil uji Chow, ditemukan probabilitas cross-section F sebesar 0,0000. Karena nilai ini jauh lebih rendah dari taraf signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Fixed Effect Model (FEM) terbukti lebih cocok dipakai dibandingkan Common Effect Model (CEM). Meskipun demikian, keputusan final belum bisa diambil hanya dari Uji Chow. Diperlukan satu langkah lagi, yaitu Uji Hausman, untuk membandingkan FEM dengan Random Effect Model (REM) dan memastikan model mana yang paling sesuai.

3.2. Uji Hausman

Uji Hausman ialah metode seleksi akhir antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Temuan pengujian ini kemudian digunakan sebagai acuan final untuk memilih model regresi data panel yang akan diestimasi.

Tabel 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.985739	3	0.0463

Sumber : Olah Data Eviews 12

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas (cross-section random) sebesar 0,0463, yang berada di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM) dalam analisis data penelitian ini. Selain itu, hasil Uji Chow dan Uji Hausman secara konsisten mengarahkan pada pemilihan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model yang paling sesuai. Oleh karena itu, Uji Lagrange Multiplier (LM) tidak perlu dilanjutkan. Hal ini karena Uji LM pada

dasarnya digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM), sedangkan model yang dipilih dalam penelitian ini telah ditetapkan melalui hasil Uji Chow dan Uji Hausman.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang dilakukann untuk melihat apakah model regresi telah memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan dalam analisis statistik. Tujuannya untuk menilai kelayakan model sehingga hasil estimasi yang diperoleh bisa digunakan sebagai dasar yang valid dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Adapun dua uji yang diterapkan pada uji asumsi klasik dalam studi ini ialah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dijalankan untuk memastikan tidak ada variabel independen yang saling berhubungan terlalu dalam persamaan estimasi. Korelasi yang kuat di antara variabel independen bisa menyebabkan ketidakakuratan dalam mengukur dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, model regresi yang baik seharusnya terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0.3921632...	0.40901288...
X2	-0.3921623...	1	-0.3581058...
X3	0.40901288...	-0.3581058...	1

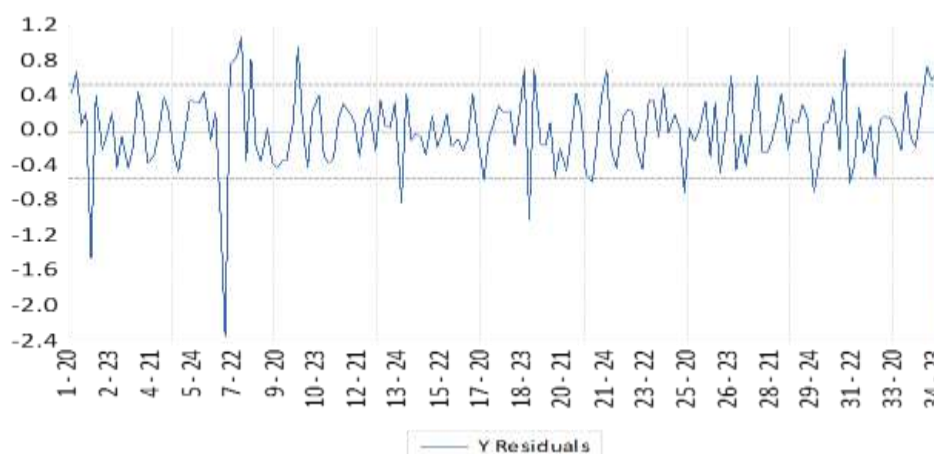
Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari hasil uji multikolinearitas yang dilakukan menggunakan correlation matrix, diperoleh nilai korelasi setiap variabel independen yang seluruhnya lebih rendah 0,80. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tidak ditemukan korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model penelitian. Sehingga, model yang diestimasi dapat dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas dan telah menunjukkan terpenuhinya salah satu asumsi dalam analisis regresi.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sebaran varians dari residual bersifat stabil atau justru berfluktuasi. Sebuah model estimasi dapat dikatakan ideal ditandai dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi ketika varians residual tetap konsisten atau tidak mengalami perubahan pada seluruh observasi. Jika varians residual berbeda antarobservasi, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari grafik residual yang diperoleh, tampak bahwa titik-titik residual berfluktuasi secara acak di sekitar nilai nol. Selain itu, tidak ditemukan pola tertentu yang mengarah pada perubahan varians residual secara

sistematis. Dengan demikian, varians galat dapat dianggap homogen pada seluruh pengamatan, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

3.4. Persamaan Regresi Data Panel

Tabel 5. Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/18/26 Time: 17:09

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	102.0747	16.04322	6.362486	0.0000
X1	-1.233678	0.144458	-8.540035	0.0000
X2	0.064717	0.029382	2.202659	0.0293
LOG(X3)	-5.723809	1.199317	-4.772556	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991622	Mean dependent var	10.15635
Adjusted R-squared	0.989354	S.D. dependent var	5.126641
S.E. of regression	0.528963	Akaike info criterion	1.754050
Sum squared resid	37.21370	Schwarz criterion	2.436547
Log likelihood	-112.0942	Hannan-Quinn criter.	2.030999
F-statistic	437.2651	Durbin-Watson stat	1.800348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews 12

Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 102.0747 - 1.2337 \text{ Pendidikan Perempuan} + 0.0647 \text{ Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan} - 5.7238 \text{ LOG(Upah Minimum Regional)}$$

Berdasarkan hasil estimasi model, nilai konstanta sebesar 102,0747 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen diasumsikan konstan, tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 102,0747. Koefisien pendidikan perempuan sebesar -1,2337 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendidikan perempuan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,2337 satuan. Selanjutnya, koefisien TPAK perempuan sebesar 0,0647 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan TPAK perempuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0647 satuan. Adapun koefisien variabel UMR dalam bentuk logaritma sebesar -5,7238 menunjukkan bahwa peningkatan UMR cenderung menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,7238 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3.5. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Dilakukannya Uji T untuk mengevaluasi kontribusisetiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Penentuan pengujian mengacu pada nilai probabilitas dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/07/26 Time: 02:25
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	102.0747	16.04322	6.362486	0.0000
X1	-1.233678	0.144458	-8.540035	0.0000
X2	0.064717	0.029382	2.202659	0.0293
LOG(X3)	-5.723809	1.199317	-4.772556	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari hasil uji T yang diperoleh, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel pendidikan perempuan memperoleh t-statistic sebesar -8,540035 dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$), sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendidikan perempuan yang terus meningkat cenderung diikuti oleh menurunnya kemiskinan. Dengan kata lain, perempuan dengan pendidikan yang tinggi, umumnya punya kemampuan lebih baik untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mendukung pengurangan kemiskinan.
 - 2) Variabel partisipasi angkatan kerja perempuan t-statistic sebesar 2,202659 dengan probabilitas 0,0293. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05, maka variabel TPAK perempuan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien yang bernilai positif menyatakam bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam periode penelitian cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Hasil ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah perempuan yang masuk ke pasar kerja belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan atau penghasilan yang layak untuk menurunkan kemiskinan.
 - 3) Variabel Upah Minimum Regional (UMR) memperoleh t-statistic sebesar -4,772556 dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$), sehingga UMR dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa UMR yang terus meningkat akan diikuti oleh penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kenaikan tingkat upah dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
- b. Uji F (Simultan)

Dilakukannya Uji F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Melalui pengujian ini, dapat diketahui sejauh mana variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 7. Hasil Uji F

F-statistic	437.2651
Prob (F-statistik)	0.000000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari hasil uji F, memperoleh F-statistic 437,2651 dengan Prob(F-statistic) 0,000000 ($<0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ketiga variabel yaitu pendidikan perempuan, TPAK perempuan, dan UMR secara bersama-sama terbukti punya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini juga menjadi bukti bahwa model regresi yang dipakai sudah layak dan mampu menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat secara keseluruhan.

- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat seberapa baik model regresi menerangkan pergerakan variabel dependen, dapat menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2) yang memiliki skala antara 0 hingga 1.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.991622
Adjusted R-squared	0.989354

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari koefisien determinasi menunjukkan R-squared bernilai 0,991622 dan Adjusted R-squared bernilai 0,989354. Nilai Adjusted R-squared yang diperoleh memperlihatkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi variasi kemiskinan yang dapat diterangkan oleh variabel pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan UMR, yaitu sebesar 98,93%. Sebanyak 1,07% sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain di luar cakupan penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh Pendidikan Perempuan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dari hasil regresi, variabel pendidikan perempuan tercatat mempunyai koefisien -1,2337 dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$), maka variabel ini terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien yang negatif membuktikan bahwa pendidikan perempuan yang terus meningkat akan diikuti oleh penurunan kemiskinan. Dengan demikian, setiap peningkatan pendidikan perempuan sebesar satu satuan, kemiskinan diperkirakan akan turun sebesar 1,2337 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Koefisien bernilai negatif mencerminkan hubungan berbanding terbalik yang terjadi antara pendidikan perempuan dan tingkat kemiskinan. Artinya, bahwa semakin tinggi akses dan pencapaian pendidikan perempuan, semakin rendah tingkat kemiskinan. Pendidikan berperan guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan wawasan, keterampilan, serta kemampuan produktif yang dimiliki individu. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, perempuan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih layak, meningkatkan tingkat pendapatan yang diterima, serta meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Investasi dalam pendidikan perempuan juga berkontribusi terhadap pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan ibu berpendidikan tinggi cenderung memperoleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga peluang keluar dari kondisi miskin menjadi lebih besar.

Secara teori, peningkatan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan teori Human Capital yang dicetuskan oleh Gary Becker, yang menempatkan pendidikan sebagai bentuk investasi untuk pengembangan mutu sumber daya manusia lewat mengembangkan wawasan, keahlian, dan produktivitas seseorang. Investasi penting untuk memperbaiki kapabilitas SDM melalui perluasan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang. Ketika kualitas individu meningkat, peluang mereka untuk meraih pekerjaan yang lebih baik dan bergaji tinggi pun terbuka lebih lebar. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan.

Temuan yang dihasilkan selaras dengan hasil beberapa penelitian terdahulu. Penelitian A. K. Dewi et al., (2025) mengungkapkan bahwa peningkatan pendidikan bagi perempuan terbukti memberikan dampak penurunan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Pendidikan perempuan yang lebih tinggi memungkinkan perempuan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, meningkatkan penghasilan rumah tangga, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil yang sama juga dikemukakan oleh Azmi & Cholily, (2023) membuktikan bahwa meningkatnya pendidikan perempuan berperan dalam menurunkan kemiskinan. Selanjutnya, penelitian Amin & Marta, (2026) juga menyimpulkan ditemukan hubungan negatif dan signifikan antara pendidikan perempuan dengan kemiskinan. Atas dasar temuan tersebut, temuan yang diperoleh semakin memberikan dukungan empiris terhadap pandangan bahwa pendidikan perempuan termasuk faktor yang berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan perempuan perlu menjadi perhatian pemerintah melalui pemerataan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, serta upaya pengurangan angka putus sekolah perempuan, terutama di daerah tertinggal. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan perempuan juga penting dilakukan guna meningkatkan kemampuan perempuan dalam memasuki pasar kerja. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan perempuan, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan tingkat kemiskinan dapat ditekan.

2) Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dari hasil estimasi model regresi, variabel partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh koefisien regresi sebesar 0,0647 dengan probabilitas sebesar 0,0293 (di bawah batas 0,05), memperlihatkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan pada partisipasi kerja perempuan akan diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,0647 satuan, dengan catatan variabel independen lainnya dianggap konstan.

Secara teoritis, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja dapat memperbesar kontribusi perempuan terhadap kegiatan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta menambah pendapatan rumah tangga dan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa TPAK perempuan justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan belum tentu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun penurunan tingkat kemiskinan. Dalam kondisi tertentu, meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja dapat menjadi indikator adanya tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong perempuan untuk ikut memasuki dunia kerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain faktor ekonomi rumah tangga, meningkatnya partisipasi kerja perempuan juga dipengaruhi oleh semakin terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Kondisi tersebut mendorong semakin banyak perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan membangun karier guna memperoleh penghasilan sendiri serta meningkatkan kesejahteraan hidup.

Selain itu, sebagian besar perempuan di Indonesia masih bekerja pada pekerjaan dengan tingkat pendapatan rendah dan tidak stabil sehingga peningkatan partisipasi kerja perempuan belum cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya fenomena *working poor*, yaitu individu yang bekerja namun pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara TPAK perempuan dan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Pengaruh tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan yang diperoleh, kondisi pasar tenaga kerja, serta struktur ekonomi yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan partisipasi kerja perempuan perlu didukung oleh perluasan akses terhadap lapangan kerja formal, peningkatan keterampilan, serta perlindungan tenaga kerja agar kontribusinya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dapat berlangsung secara lebih efektif.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Aprianing & Suharno, (2025) yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan jumlah perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja tidak selalu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang memadai. Akibatnya, sebagian tenaga kerja perempuan bekerja pada sektor informal atau pekerjaan dengan pendapatan rendah, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, upaya peningkatan TPAK perempuan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia. Pemerintah tidak hanya perlu mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, tetapi juga memperluas kesempatan kerja formal, meningkatkan keterampilan dan pendidikan perempuan, serta memperkuat perlindungan tenaga kerja dan penerapan upah yang layak. Melalui langkah tersebut, partisipasi kerja perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja, namun mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan membantu menekan angka kemiskina.

3) Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dari hasil estimasi regresi, UMR memperoleh nilai koefisien -5,7238 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$), sehingga UMR dapat dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, setiap peningkatan UMR sebesar satu satuan diperkirakan mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,7238 satuan, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

Koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan UMR dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebab peningkatan upah minimum bisa meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatnya pendapatan juga memiliki dampak bertambahnya daya beli masyarakat, sehingga akses terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak menjadi lebih mudah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendapatan mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan. Rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga risiko mengalami kemiskinan menjadi lebih rendah.

Selain itu, peningkatan UMR juga dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang memperoleh upah yang layak cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih baik, tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup yang lebih memadai. Dengan demikian, kebijakan peningkatan upah minimum bukan hanya memberikan manfaat bagi pekerja dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Meskipun demikian, pengaruh UMR terhadap tingkat kemiskinan tidak terlepas dari kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah. Naiknya UMR yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil, maka dapat menimbulkan dampak lain seperti pengurangan tenaga kerja atau meningkatnya biaya produksi perusahaan. Oleh sebab itu, kebijakan penetapan UMR perlu dicancang secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah. Pertimbangan tersebut diperlukan agar tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Secara teoritis, terdapat hubungan negatif antara UMR dan kemiskinan. Semakin tinggi upah yang diterima pekerja, semakin besar juga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan terjadinya penurunan kemiskinan. Upah dapat diartikan sebagai kompensasi finansial yang diterima tenaga kerja dari pemberi kerja sebagai balas jasa atas pekerjaan, waktu, dan kontribusi yang telah diberikan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau proses produksi. Sementara itu, kebijakan UMR merupakan bentuk perlindungan pemerintah untuk para pekerja dengan menjamin penerimaan upah minimum yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup secara wajar.

Hasil tersebut sesuai dengan temuan Akbar et al., (2022) yang memperlihatkan bahwa UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, peningkatan UMR mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat karena adanya tambahan penghasilan bagi para pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, Upah Minimum Regional (UMR) memiliki kontribusi pada penurunan kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan standar kebutuhan hidup yang layak, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi ekonomi daerah. Di samping itu, pengawasan terhadap penerapan UMR juga perlu ditingkatkan agar pekerja memperoleh hak upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pelaksanaan kebijakan yang efektif, peningkatan UMR diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

4) Pengaruh Pendidikan Perempuan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Dari hasil uji simultan (uji F), didapatkan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 ($<0,05$), sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan Upah Minimum Regional (UMR) secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, hasil pengujian koefisien determinasi memperlihatkan Adjusted R-squared 0,989354. Nilai tersebut membuktikan bahwa variabel pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan UMR mampu menerangkan sebesar 98,93% perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi selama periode penelitian. Adapun 1,07% sisanya dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa kemiskinan bukan semata-mata dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh beragam aspek ekonomi dan sosial yang saling berhubungan. Salah satu faktor yang memiliki kontribusi besar adalah pendidikan perempuan. Peningkatan pendidikan perempuan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja yang lebih baik. Peningkatan kualitas tersebut dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan serta meningkatkan potensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka kemampuan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga semakin baik sehingga tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Partisipasi angkatan kerja perempuan mencerminkan keikutsertaan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam penelitian ini keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja memberikan dampak positif terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah perempuan yang bekerja belum sepenuhnya diimbangi dengan pekerjaan yang berkualitas serta peningkatan pendapatan yang memadai. Sebagian besar perempuan di Indonesia masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat upah yang cukup rendah, produktivitas yang terbatas, dan minim perlindungan kerja sehingga peningkatan partisipasi kerja perempuan belum mampu memberikan dampak yang optimal dalam mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan UMR mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja sehingga daya beli masyarakat meningkat dan kebutuhan hidup

dapat terpenuhi dengan lebih baik. Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa faktor pendapatan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.

Temuan penelitian ini selaras dengan dengan pandangan Gary Becker dalam Teori Modal Manusia (Human Capital Theory). Teori ini menempatkan pendidikan sebagai bentuk investasi strategis guna mengasah kualitas SDM. Pendidikan membekali individu dengan memperluas wawasan, dan juga membantu individu mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di samping itu, teori pasar tenaga kerja menjelaskan bahwa kesempatan kerja dan tingkat upah memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan. Pasar tenaga kerja yang baik dapat mendorong meningkatkan pendapatan dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan rendahnya tingkat upah dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja. Maka dari itu, situasi di pasar kerja termasuk faktor yang turut memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, memperlihatkan bahwa upaya penurunan kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya melalui satu kebijakan saja, tetapi memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan kualitas pendidikan perempuan, perluasan kesempatan kerja yang layak, serta kebijakan upah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meningkatnya kualitas SDM, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih optimal di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pendidikan perempuan terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) dengan koefisien -1,233678, yang memperlihatkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan dapat membantu menurunkan kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan lebih tinggi biasanya mempunyai kompetensi yang lebih baik, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan memadai. Pada akhirnya, kondisi inilah yang ikut mengangkat kesejahteraan dan menekan kemiskinan. Partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,0293 ($< 0,05$), serta koefisien regresi 0,064717. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut bisa terjadi karena masih banyaknya perempuan bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang kecil, sehingga peningkatan partisipasi kerja belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan secara optimal. Upah Minimum Regional (UMR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) dan koefisien regresi -5,723809. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan UMR dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli tenaga kerja sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak. Dengan demikian, kenaikan UMR dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan Upah Minimum Regional (UMR) terbukti memengaruhi kemiskinan di Indonesia jika dianalisis secara simultan. Hal tersebut terlihat dari Prob(F-statistic) yaitu 0,000000 ($< 0,05$), sehingga ketiga variabel tersebut terbukti secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, Adjusted R-squared sebesar 0,989354 menunjukkan bahwa 98,93% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan perempuan, partisipasi angkatan kerja perempuan, dan UMR yang digunakan dalam model penelitian.

Referensi

1. Akbar, A., Nazipawati, Primandari, N. R., & Muhariah, N. Al. (2022). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2020. 10(02), 80–91. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
2. Alkire, S., Kövesdi, F., Scheja, E., & Vollmer, F. (2023). Moderate Multidimensional Poverty Index : Paving the Way Out of Poverty. Social Indicators Research, 168(1), 409–445. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5>
3. Aprianing, C. A., & Suharno. (2025). Analisis Pengaruh Gender pada Kemiskinan Indonesia Tahun 2018-2023. JURNAL EKONOMIKA45, 12(2), 1–13. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/4026/3495>
4. Amin, M. A., & Marta, J. (2026). Pengaruh Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 8, 140–149.
5. Asih, N. P. P., & Sukadana, I. W. (2024). Partisipasi Perempuan Pada Pasar Tenaga Kerja : Analisis Data Provinsi Bali Tahun 1980-2020. Journal Of Social Science Research, 4, 7058–7071.
6. Azmi, A. A., & Cholily, V. H. (2023). Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020. Jurnal Studi Pembangunan, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.32734/jsp.v2i1.11131>
7. Badan Pusat Statistik, B. (2023). Statistik Pendidikan 2023. Badan Pusat Statistik.
8. Badan Pusat Statistik, B. (2024). Statistik Pendidikan 2024.
9. Baidury, A., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). PENGARUH PENDIDIKAN PEREMPUAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TIMUR. Journal Of Economics, 2, 102–109.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10663>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

10. Damanik, D. B. N., & Suharianto, J. (2025). Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan Melalui IPM sebagai Variabel Intervening : Studi pada 34 Provinsi di Indonesia. 2.
11. Dewi, A. K., Septiani, R. E., Rahmah, S., Aini, S. S. Q., & Dewantara, G. F. (2025). Pengaruh Pendidikan Perempuan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 137–148. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i1.1364>
12. Milyan, Idaman, & Sahili, L. O. (2021). ANALISIS SOSIAL BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 03(01), 147–157.
13. Ramadhani, R., Sari, C. K., & Faizah, N. (2025). Pendidikan untuk Perempuan : Kesetaraan Gender. 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i2.1830>
14. Putri, A., Fardani, M., Ignasha, N., Farliana, N., & Chairunnisa, N. A. (2023). PENGARUH GENDER TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023. 25–33.
15. Permenaker. (2024). Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/309918/Permenaker-No-16-Tahun-2024>, 1–7.
16. Simorangkir, J. H., Saragih, H., & Purba, I. R. (2025). Strategi Perencanaan Pendidikan Perkotaan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Ketimpangan Akses Pendidikan. *J-CEKI : Jurnal CendekiaIlmiah*, 4(6), 2957–2967.
17. Suminto, A., & Huda, M. (2025). EKONOMETRIKA DASAR : Seri Analisis Regresi Linier, Regresi Data Panel, ECM, VAR/VECM dan ARDL (pertama). Madza Media.
18. Widyasworo, R. (2013). Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).